

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190

TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/672/RB.06/2022

6 Desember 2022

Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2022

**Yth. Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

di

Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Kemenko PMK tahun 2022 adalah **79,04** dengan kategori "**BB**". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	16,26	16,33
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,36	6,11
	III. Reform	30,00	21,13	21,46
Total Komponen Pengungkit		60,00	43,75	43,90

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,25	8,39
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,26	9,28
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,91	9,04
4.	Kinerja Organisasi	10,00	8,52	8,44
Total Komponen Hasil		40,00	33,94	35,15
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	77,69	79,04

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kemenko PMK telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan *reform* serta diikuti dengan peningkatan nilai pada total komponen hasil. Namun demikian Kemenko PMK perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Terdapat 11 hasil antara Kemenko PMK yang dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Indeks Sistem Merit	0-400	280,0	271,5	KASN
2.	Kualitas Kebijakan	0-100	36,63	36,63	LAN
3.	Kualitas Pengelolaan Aset	0-4	3,46	3,64	Kementerian Keuangan
4.	Indeks Profesional ASN	0-100	43,99	29,03	BKN
5.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0-5	3,38	2,93	Kementerian PAN RB
6.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	39,44	54,20	LKPP
7.	Kualitas Pengelolaan Anggaran	0-100	94,58	92,84	Kementerian Keuangan
8.	Indeks Pelayanan Publik	0-5	4,17	4,13	Kementerian PANRB
9.	Maturitas SPIP	0-5	3	3	BPKP
10.	Kapabilitas APIP	0-5	3	2	BPKP
11.	Indeks Pengawasan Kearsipan	0-100	65,94	69,07	ANRI

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara, yaitu penilaian kualitas pengelolaan aset, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa dan indeks pengawasan arsip. Terdapat beberapa penilaian yang mengalami penurunan diantaranya indeks sistem merit, indeks profesional ASN, indeks SPBE, kualitas pengelolaan anggaran, dan indeks pelayanan publik. Penilaian hasil antara indeks kualitas kebijakan tidak mengalami

perubahan pada tahun 2022, namun secara keseluruhan hasil antara tahun 2022 mengalami penurunan.

3. Kemenko PMK telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi RB tahun 2021, antara lain:
 - a. Pemberian sistem *reward* pada Agen Perubahan Berprestasi dengan penghargaan untuk mengikuti kegiatan *Young Progressive Academy (YPA)* Tahun 2022;
 - b. Penyusunan program kerja agen perubahan berdasarkan hasil survey aspirasi pegawai Kemenko PMK dengan tujuan agar dapat mengakomodasi kebutuhan pegawai dan pelaksanaannya direview setiap bulan untuk memonitor capaian dan hasil program kerja;
 - c. Penetapan *Quick win* Kemenko PMK berdasarkan usulan *issue* dari masing-masing kedeputian/unit kerja eselon I, dan yang ditetapkan sebagai *quick win* adalah Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE);
 - d. Perubahan pengaturan kode etik pegawai Permenko Kesra no 41 tahun 2010 menjadi Permenko PMK no 4 tahun 2022 yang sudah mengakomodir *core value* BerAKHLAK;
 - e. Melakukan evaluasi kelembagaan dan telah dilakukan penyesuaian unit kerja di lingkungan Kemenko PMK (penambahan 1 unit kerja eselon 2, dan pengurangan 1 unit kerja eselon 1);
 - f. Membangun dashboard situation room berbasis spasial dan terintegrasi yang datanya bersumber dari 26K/L dan dapat di drill down secara mendetail guna mengoptimalkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemenko PMK;
 - g. Aplikasi SINTEGRA baru telah diterapkan berdasarkan SE Sesmenko PMK No. 220/SE/SES/Peg.07/09/2022. dengan perbaikan diantaranya, pegawai sudah tidak bisa menggunakan fake GPS dan telah menggunakan fitur foto untuk presensi pegawai sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk memantau kedisiplinan pegawai;
 - h. Sudah dilakukan pemetaan pegawai dalam nine box talent manajemen (9 box manajemen talenta) sebagai dasar untuk pengembangan pegawai, seperti Diklat Teknis, workshop dan soft skill (kemampuan pada keterampilan sosial, komunikasi, kecerdasan sosial dll) atau pengembangan karakteristik seseorang;
 - i. Menyusun petunjuk teknis SPIP dan MR di lingkungan Kemenko PMK berdasarkan Kepmenko no 28 tahun 2021 serta pembentukan Satgas penyelenggaraan SPIP dengan Kepmenko no 29 tahun 2021;
 - j. Menyusun Permenko PMK 3/2022 tentang Standar Pelayanan Publik, dan Kepmenko PMK 31/2022 tentang Pedoman Pelayanan Publik di lingkungan Kemenko PMK.

4. Beberapa contoh penerapan reformasi birokrasi di Kemenko PMK yang paling berdampak antara lain:
 - a. Kemenko PMK telah membangun *dashboard situation room* yang datanya terintegrasi dengan 26 K/L guna membantu fungsi KSP antara Kemenko PMK dan K/L dibawahnya;
 - b. Dalam penanganan kemiskinan ekstrim Kemenko PMK mengkoordinasikan Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah, BUMN dan Swasta untuk membangun rumah layak huni di pemukiman-pemukiman kumuh di Indonesia;
 - c. Menghadapi tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak, Kemenko PMK mensinkronkan beberapa peraturan perundangan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual mulai dari hulu ke hilir guna menegaskan komitmen pemerintah untuk menangani isu tersebut;
5. Beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi di antaranya sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi dan internalisasi terhadap budaya kerja telah dilakukan secara masif, namun belum dilakukan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap RB dan budaya kerja yang telah diinternalisasikan terhadap seluruh pegawai, khususnya terkait dengan tahapan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - b. Regulasi atau kebijakan yang disusun oleh Kemenko PMK belum dilakukan pemetaan atas dampak dari kebijakan yang dihasilkan bagi masyarakat atau pemangku kepentingan
 - c. Penerapan *e-government* belum berjalan optimal, sehingga belum sepenuhnya mempermudah pemberian pelayanan baik layanan internal maupun eksternal kepada masyarakat/*stakeholder*. Hal tersebut tergambar dari Indeks SPBE Kemenko PMK yang mengalami penurunan pada penilaian 2022 dengan kategori “cukup”;
 - d. Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM, antara lain ukuran kinerja individu yang belum sepenuhnya mengacu kepada kinerja organisasi, serta berkurangnya hasil penilaian merit sistem;
 - e. Pemanfaatan aplikasi terkait pengumpulan dan pengukuran data kinerja belum berjalan dengan baik;
 - f. Dalam peningkatan pengawasan telah dilakukan upaya melalui:
 - Pembangunan Zona Integritas pada beberapa unit kerja, namun belum ada yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM;
 - Implementasi kebijakan benturan kepentingan, *Whistle Blowing System*, pengaduan masyarakat dan pengendalian gratifikasi, namun belum dilakukan monitoring secara berkala;
 - f. Telah melakukan survey kepuasan pada seluruh pelayanan publik di KemenkoPMK, namun hasil SKM Kemenko PMK Tahun 2022 yaitu 79,20 belum ditindaklanjuti sehingga belum tampak strategi perbaikan yang dilakukan untuk pelayanan publik.

6. Terkait komponen hasil, menunjukan bahwa pada tahun 2022, Kemenko PMK memperoleh nilai baik dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	77,03	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	79,20	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	90,37	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh KPK
5	Survei Internal Organisasi	0-100	81,22	SPI Internal oleh KPK

Selain hal tersebut, komponen hasil juga mencakup penilaian atas capaian penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 dan penghargaan-penghargaan lain yang diterima.

7. Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Kemenko PMK, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:
- Mendorong agen perubahan untuk menyusun rencana aksinya, yang mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja, *Core Values* ASN BerAkhlak, area perubahan dalam Reformasi Birokrasi dan mengukur tingkat keberhasilannya;
 - Melakukan *Regulatory Impact Analysis (RIA)* agar dapat menjamin efektivitas dari kebijakan-kebijakan yang telah disusun;
 - Meningkatkan implementasi e-government melalui pemanfaatan sistem informasi yang lebih maksimal baik di lingkup internal pegawai maupun untuk pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga seluruh pegawai dan masyarakat dapat memperoleh kemudahan pelayanan;
 - Mempercepat terlaksananya sistem merit dengan menerapkan seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Hal ini termasuk mengimplementasikan aturan tentang manajemen talenta sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN;
 - Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja SIPK dan menyusun pedoman akuntabilitas kinerja sebagai acuan dalam mencapai kinerja yang diharapkan;
 - Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas, sehingga dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui berbagai inovasi, sistem pengawasan, dan sistem integritas di tingkat unit kerja;

- g. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, *Whistle-Blowing System*, dan benturan kepentingan. Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas sistem pengawasan;
- h. Mendorong seluruh unit kerja melaksanakan survei dan menginformasikan hasilnya kepada *stakeholders*, serta terus meningkatkan layanan publik secara berkelanjutan yang mampu memberikan dampak bagi masyarakat.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami berharap agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.


**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan**
Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.